

Laporan National Kawula Survey Q1 2025



**Kinerja Pemerintah dan Legislatif serta
Opini Publik**



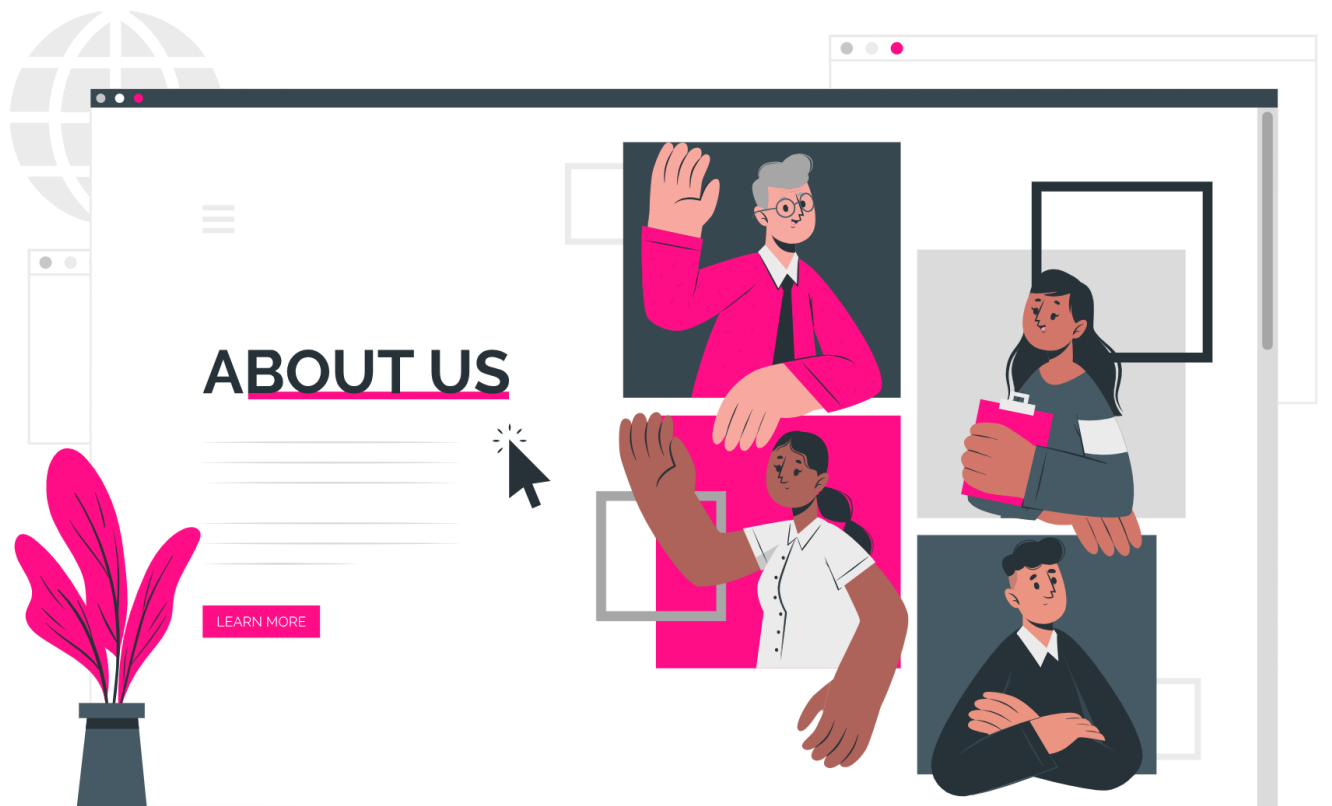
Daftar Isi

<u>Perkenalan.....</u>	3
<u>Metodologi.....</u>	6
<u>Temuan.....</u>	9
<u>Isu Prioritas.....</u>	12
<u>Penilaian Kinerja Pemerintah.....</u>	20
<u>Ekspektasi terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.....</u>	26
<u>Pantauan Partai Politik.....</u>	32
<u>Opini Publik terhadap RUU Berjalan.....</u>	37





Perkenalan



Sumber: Storyset

Sekilas tentang Yayasan PP17

Apa itu Yayasan PP17?

Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) lahir atas kekhawatiran sekaligus harapan kami untuk meningkatkan partisipasi anak muda di arena politik. Politik yang kami bayangkan tidak melulu tentang jalur formal, tetapi juga untuk memahami pilihan politik yang termanifestasi dalam pilihan hidup sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi anak muda, PP17 memiliki beberapa inisiatif program. Pertama, yaitu **Survei Nasional Kawula17** yang kami lakukan per kuartal tentang pemantauan partai dan tokoh politik, dan pandangan terhadap isu untuk memetakan dan memberikan gambaran yang representatif terhadap posisi masyarakat Indonesia terkait isu-isu terkini yang juga dibahas di DPR.

PP17 juga meluncurkan **Kawula17.id** yang merupakan [Voting Advice Application \(VAA\)](#). Melalui Kawula17.id, (calon) pemilih bisa melihat pilihan partai berdasarkan isu yang mereka usung. Isu-isu yang diangkat harus relevan terhadap kebutuhan pemilih dan dinamis.

Bagaimana [VAA Kawula17.id](#) bekerja?

Seperti VAA pada umumnya, beberapa set pertanyaan disediakan bagi para *users*. Pertanyaan-pertanyaan ini berisi isu maupun kebijakan yang saat ini sedang dibahas di DPR, serta ramai di kalangan publik. **Pemetaan posisi partai politik** dilakukan di masing-masing isu. Posisi ini didapatkan melalui **desk research** di portal berita maupun **konfirmasi langsung dengan perwakilan partai**.

Setelah posisi-posisi partai teridentifikasi, kuesioner disebar melalui **survei online** untuk kalangan publik. Dari jawaban-jawaban yang terkumpul, Kawula17 mencoba untuk **memetakan pilihan** publik dengan sikap partai politik di masing-masing isu yang tersedia. Hasil penelitian ini digunakan untuk menjaga VAA Kawula17 tetap *up to date*.

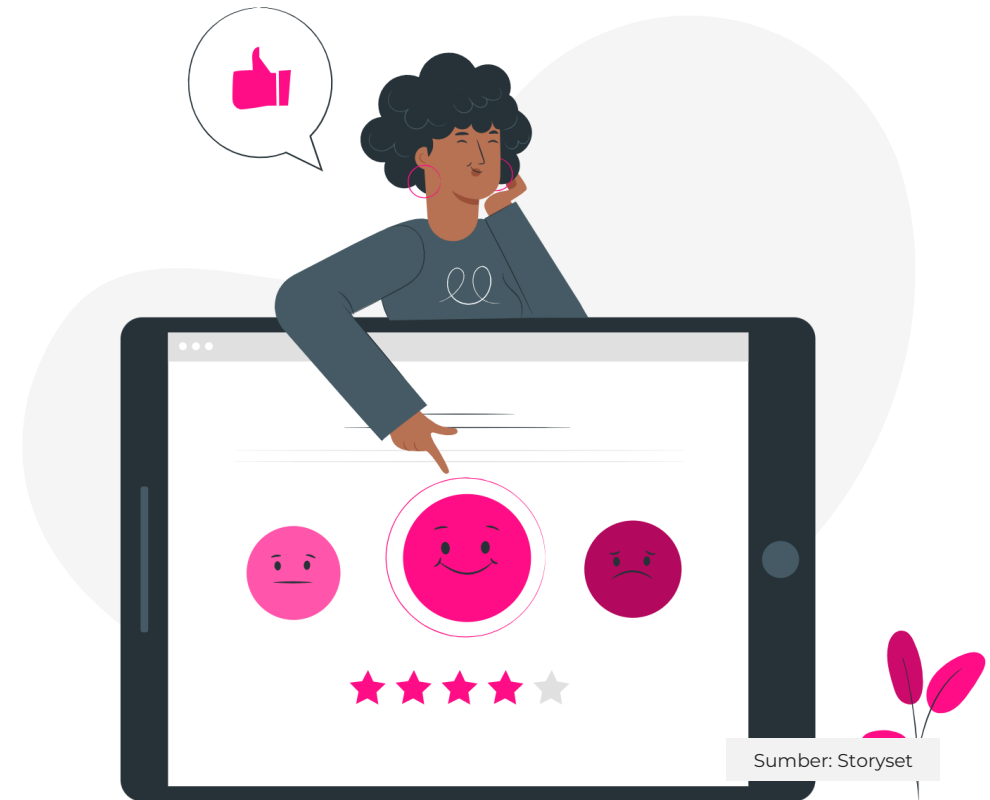


Tentang Survei Nasional Kawula17

National Kawula17 Survey (NKS) atau Survei Nasional Kawula17 bertujuan untuk mendorong diskusi, kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap kondisi terkini. NKS dilakukan empat kali dalam setahun (per kuartal) untuk melihat tren yang terjadi di masyarakat. Publikasi setiap laporan NKS dapat diakses melalui website **Kawula17.id**.

Pada kuartal pertama tahun ini, Kawula17 mempublikasikan laporan NKS yang berisi tentang:

1. Isu prioritas masyarakat.
2. Penilaian kinerja pemerintah.
3. Ekspektasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
4. Pantauan partai politik.
5. Opini publik dalam RUU prolegnas.





Metodologi



Sumber: Storyset



Tujuan Penelitian

Memahami sikap masyarakat terhadap:

1. Isu yang sedang berkembang
2. Persepsi masyarakat terhadap program dan kinerja pemerintah
3. Prioritas yang dianggap penting untuk diselesaikan.



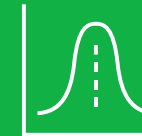
Periode Pengambilan Data

6 – 14 Februari 2025



Metodologi

Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring



Sampling

n = 383 responden*
Umur: 17 – 44 tahun
Area: Indonesia

**representatif untuk Indonesia*

Profil Responden*

base: all, n = 383

Jenis kelamin

Laki-laki	53%
Perempuan	47%

Umur

17-24 tahun	35%
25-34 tahun	38%
35-44 tahun	27%

Pendidikan

SMP/SMA/ sederajat	84%
Perguruan Tinggi	16%

Wilayah

Sumatera	22%
Jawa	54%
Lainnya	24%

Area

Perkotaan	73%
Pedesaan	27%

* Hasil ditimbang berdasarkan pilihan partai politik pada Pemilu 2024.



Temuan



Temuan ⁽¹⁾



Pantauan Partai Politik

Pada kuartal pertama 2025, **Partai Gerindra muncul sebagai pilihan utama pemilih (21%)**. Sementara itu, **partai-partai yang bergabung dengan koalisi KIM+ setelah Pemilu mengalami tren penurunan elektabilitas**, terutama Partai NasDem yang turun menjadi 2% dan PKB yang hanya memperoleh 1%. Di sisi lain, partai-partai non-parlemen masih menghadapi tantangan besar untuk menarik dukungan pemilih, dengan tingkat elektabilitas kurang dari ambang batas parlemen atau di bawah 4%.



Penilaian Kinerja Pemerintah

Pada 100 hari pertama kerja, **skor penilaian terhadap kinerja pemerintah berada di angka 5,4** dari 10. Penilaian ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan Q3 2024 (5,4) dan Q2 2024 (5,7). Pemilih partai-partai yang tergabung dalam koalisi KIM+ memberikan penilaian yang lebih tinggi dari rata-rata, dengan skor 6,2 dari pemilih Partai Gerindra, 6,1 dari pemilih Golkar, dan 6,3 dari pemilih PAN.

Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam isu pemberantasan korupsi. 65% masyarakat menilai kinerja pemerintah (sangat) buruk dalam isu korupsi. Penilaian buruk ini menjadikan upaya penegakan korupsi memiliki tingkat kepuasan terendah di antara isu-isu lainnya.



Isu Prioritas Masyarakat

Isu ekonomi menjadi perhatian utama masyarakat pada kuartal pertama 2025, dengan 60% responden menempatkannya sebagai prioritas utama. Isu ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan kuartal sebelumnya, dari 36% di Q3 2024 dan 29% di Q2 2024. Kenaikan serupa juga terjadi pada isu kesehatan, yang naik 11% dari Q3 2024, serta isu hak asasi manusia (HAM), yang meningkat dengan persentase yang sama.

Dalam isu lingkungan, masyarakat menilai bahwa masalah banjir dan kekeringan (58%) serta pengelolaan sampah yang tidak efisien (57%) merupakan tantangan utama yang perlu segera diatasi.

Sementara itu, beberapa persoalan menjadi perhatian terkini, seperti **mahalnya harga bahan pokok (56%), tingginya angka pengangguran (51%), maraknya judi online (38%), dan korupsi (37%)**. Terkait harga bahan pokok, urgensinya meningkat sebesar 17% dibandingkan Q3 2024, di mana sebelumnya hanya 39% yang menganggapnya sebagai prioritas utama. Peningkatan serupa juga terlihat pada persoalan pengangguran tinggi, yang naik 18% dari sebelumnya 33% di Q3 2024.

Temuan (2)



Ekspektasi terhadap Pemerintah

1 dari 2 orang mengaku hanya agak yakin atau bahkan (sangat) tidak yakin terhadap kemampuan pemerintah dalam merealisasikan programnya. Ketidakyakinan ini terutama disebabkan oleh kekhawatiran terhadap korupsi (45%) dan besarnya jumlah kementerian (43%), yang dianggap dapat menghambat efektivitas pemerintahan.

Di sisi lain, 47% masyarakat merasa (sangat) yakin bahwa pemerintah mampu menjalankan program-programnya dengan baik. Dukungan ini terutama berasal dari pemilih partai yang tergabung dalam koalisi KIM+, seperti Golkar (60%), Partai Gerindra (69%), dan PAN (67%). Keyakinan terhadap pemerintah didasarkan pada tiga faktor utama, yaitu karakter Prabowo (44%), dukungan masyarakat (44%), dan visi-misi yang dianggap realistis (39%).

Dalam hal program prioritas, **makan bergizi gratis (78%), rencana kenaikan gaji ASN (34%), pembangunan infrastruktur (31%), dan pemeriksaan kesehatan gratis (31%)** adalah program pemerintahan Prabowo-Gibran yang paling diketahui masyarakat. Sementara itu, program terkait badan penerimaan negara mendapatkan tingkat ketidakpuasan tertinggi, dengan 15% responden menyatakan sangat tidak puas.



Opini Publik terhadap RUU Berjalan

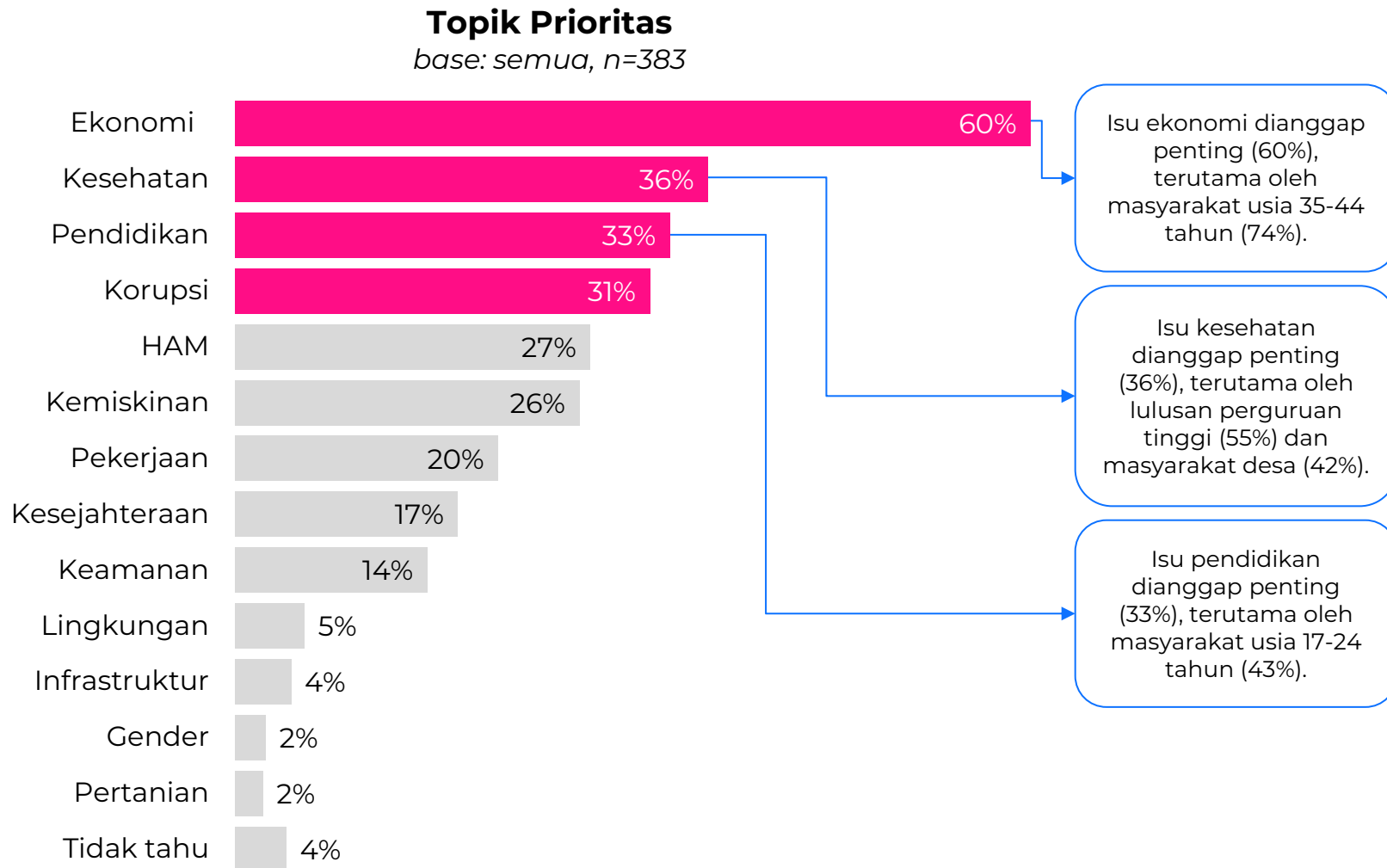
RUU Polri mendapat penolakan dari 42% masyarakat. Di sisi lain, ada tiga RUU yang mendapat dukungan mayoritas, yaitu RUU Perampasan Aset (65%), RUU Masyarakat Adat (67%), dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (69%). Tingginya dukungan ini mencerminkan urgensi pengesahan ketiga RUU tersebut dalam pandangan publik. Terkait partai, **PKS, PKB, dan NasDem memiliki sikap yang paling relevan dengan opini publik** terhadap lima RUU yang sedang dibahas. Sebaliknya, sikap Partai Golkar dan PDIP terhadap RUU terpilih kurang sesuai dengan pandangan sebagian besar publik saat ini.

Partai Politik	Skor Indeks
PKS	61,1
PKB	61,0
Partai NasDem	61,0
Partai Gerindra	46,2
PAN	35,6
Partai Demokrat	35,5
Partai Golkar	31,1
PDIP	28,9



1 Isu Prioritas

2 dari 3 masyarakat Indonesia menganggap ekonomi sebagai topik yang paling penting sejauh ini



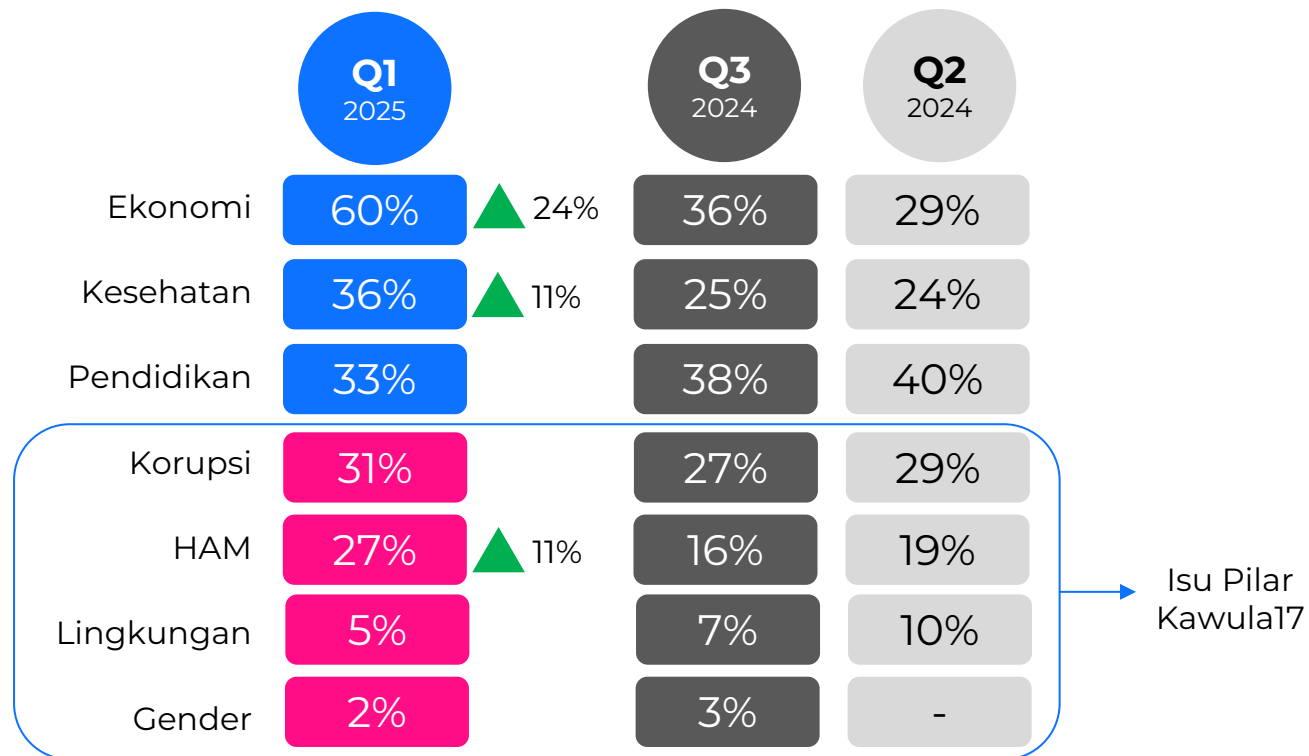
Masyarakat menilai ekonomi (60%), kesehatan (36%), pendidikan (33%), dan korupsi (31%) sebagai empat isu paling penting saat ini. Keempat topik ini mencerminkan kekhawatiran utama masyarakat terhadap kondisi yang sedang terjadi.

Isu ekonomi lebih banyak disoroti oleh kelompok usia 35-44 tahun (74%), sedangkan kesehatan lebih banyak disorot masyarakat desa (42%).

Topik ekonomi mengalami kenaikan signifikan dari Q2 dan Q3 2024

Topik Prioritas

base: semua, n=383



Pada kuartar pertama tahun 2025, topik ekonomi mengalami kenaikan signifikan sebagai topik prioritas masyarakat.

Kenaikan ini dapat disebabkan oleh beberapa isu sebelumnya, seperti kelangkaan gas LPG, rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12%, dan menjelang bulan Ramadhan.

Isu kesehatan dan HAM juga semakin mendapat perhatian masyarakat pada Q1 2025 ini.

Namun, empat isu utama Kawula17 masih kurang diperhatikan, kecuali korupsi dan HAM yang mulai meningkat. Ini menegaskan perlunya upaya lebih besar untuk meningkatkan kesadaran soal lingkungan dan gender.

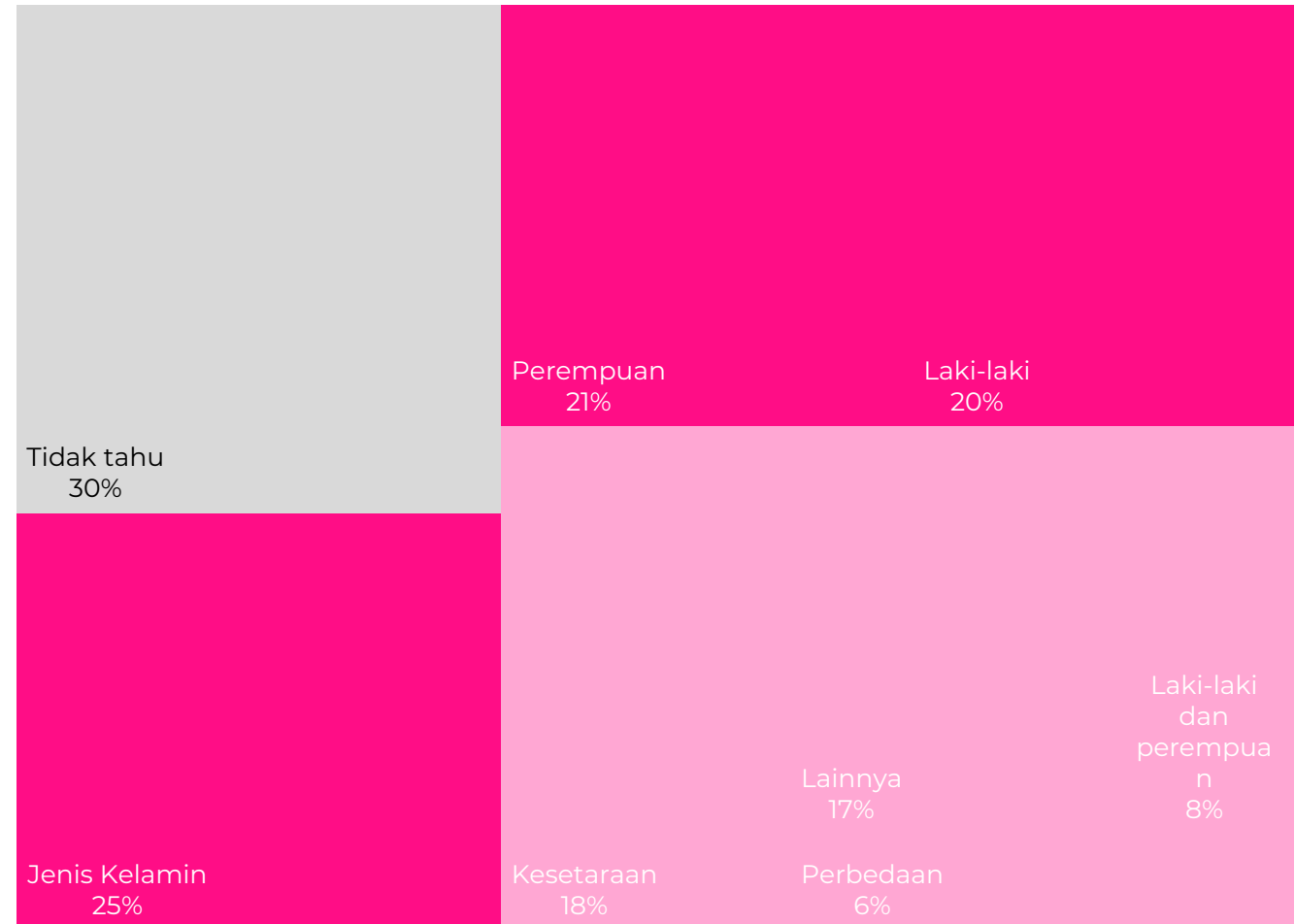
Masyarakat mengasosiasikan kata “Gender” dengan konsep umum yang dangkal

1 dari 3 orang tidak dapat mengaitkan kata “Gender” dengan apapun. Ketidakmampuan ini dapat disebabkan oleh kurangnya paparan diskusi dan edukasi mengenai isu gender yang menghambat pemahaman yang lebih mendalam.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat mengaitkan kata “Gender” dengan konsep umum yang tidak mendalam, seperti jenis kelamin, laki-laki, dan perempuan yang menunjukkan pemahaman yang dangkal mengenai isu ini.

Asosiasi Kata “Gender”

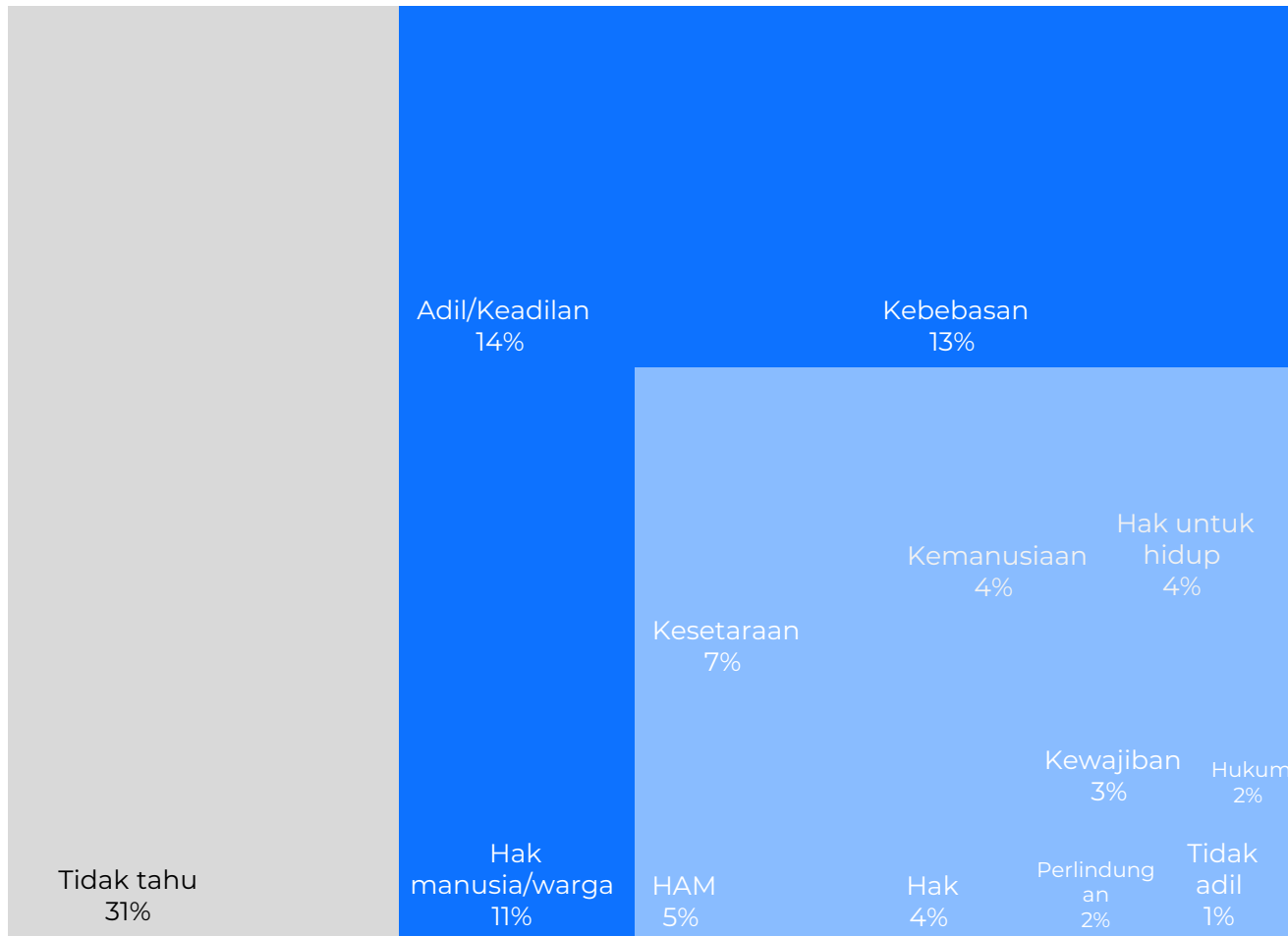
base: semua, n=383



1 dari 3 masyarakat tidak bisa mengasosiasikan kata “HAM” dengan apapun

Asosiasi Kata “HAM”

base: semua, n=383



Sama halnya dengan gender, 1 dari 3 orang tidak dapat mengaitkan kata “HAM” dengan apapun. Kurangnya paparan diskusi dan edukasi mengenai isu HAM dapat menjadi alasan yang menghambat pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini.

Meski demikian, masyarakat yang dapat mengasosiasikan kata “HAM” memiliki jawaban yang beragam, seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Hal ini menunjukkan pemahaman masyarakat yang terpapar dengan isu ini cukup baik dalam memahami konsep HAM.

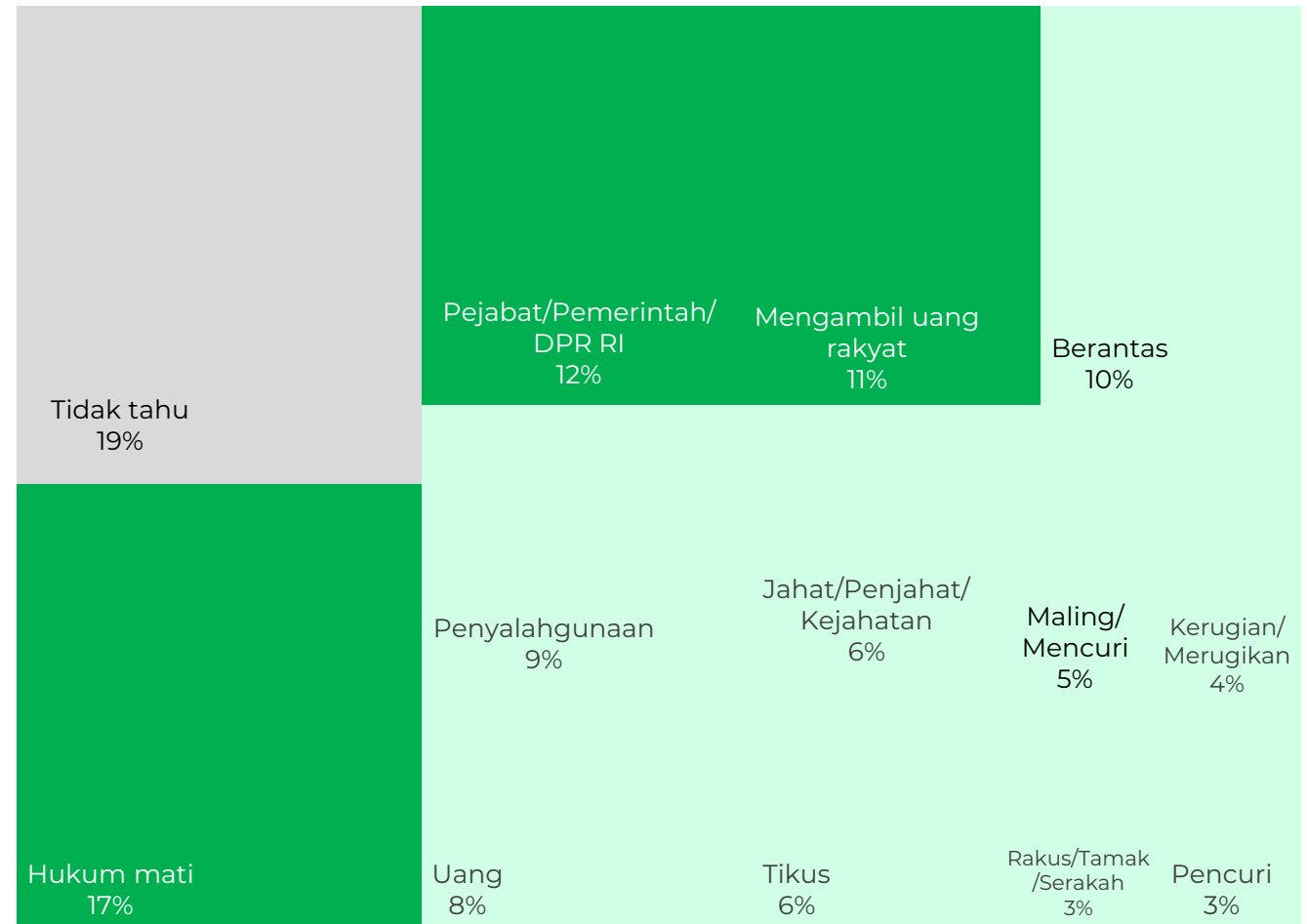
Masyarakat paling banyak mengasosiasikan kata “Korupsi” dengan hukuman mati

Sebanyak 17% masyarakat mengasosiasikan “korupsi” dengan hukuman mati, menjadikannya asosiasi paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa ada dorongan kuat dari masyarakat untuk hukuman yang lebih berat terhadap koruptor. Di sisi lain, temuan ini menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap hak untuk hidup yang masih rendah.

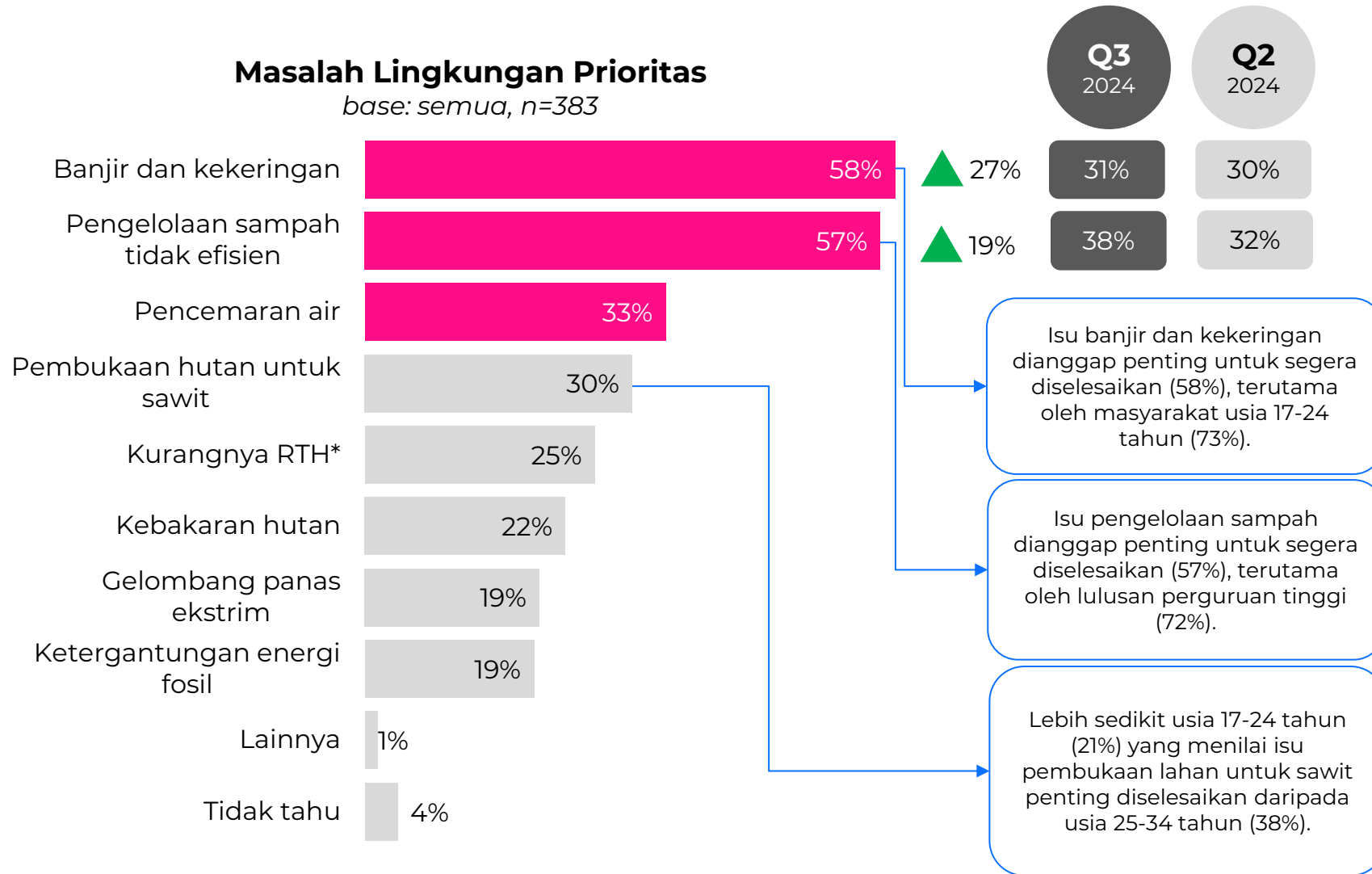
Namun, sebanyak 34% masyarakat mengasosiasikan kata “korupsi” dengan hal-hal yang tidak termasuk dalam kategori utama yang ditampilkan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang korupsi sangat beragam yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Asosiasi Kata “Korupsi”

base: semua, n=383



Banjir dan kekeringan, diikuti oleh pengelolaan sampah yang tidak efisien, menjadi dua permasalahan lingkungan utama masyarakat



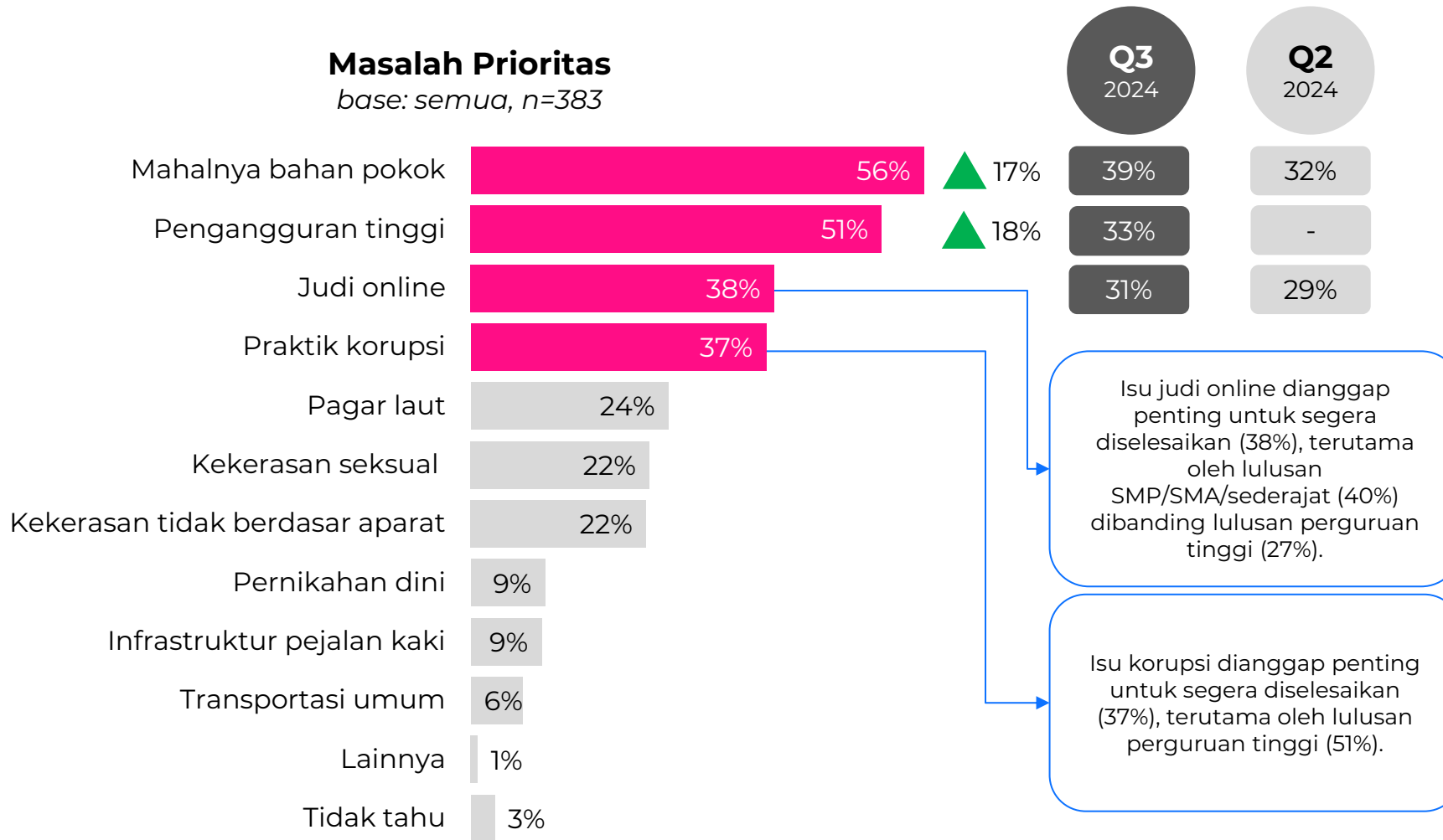
Banjir dan kekeringan (58%) serta pengelolaan sampah (57%) menjadi dua permasalahan lingkungan yang dianggap penting untuk segera diselesaikan oleh pemerintah. Dua masalah ini juga menjadi permasalahan utama pada Q3 2024 (pengelolaan sampah: 38%, banjir dan kekeringan: 31%).

*RTH = ruang terbuka hijau

Mahalnya harga bahan pokok masih menjadi masalah utama yang perlu segera diselesaikan pemerintah

Masalah Prioritas

base: semua, n=383



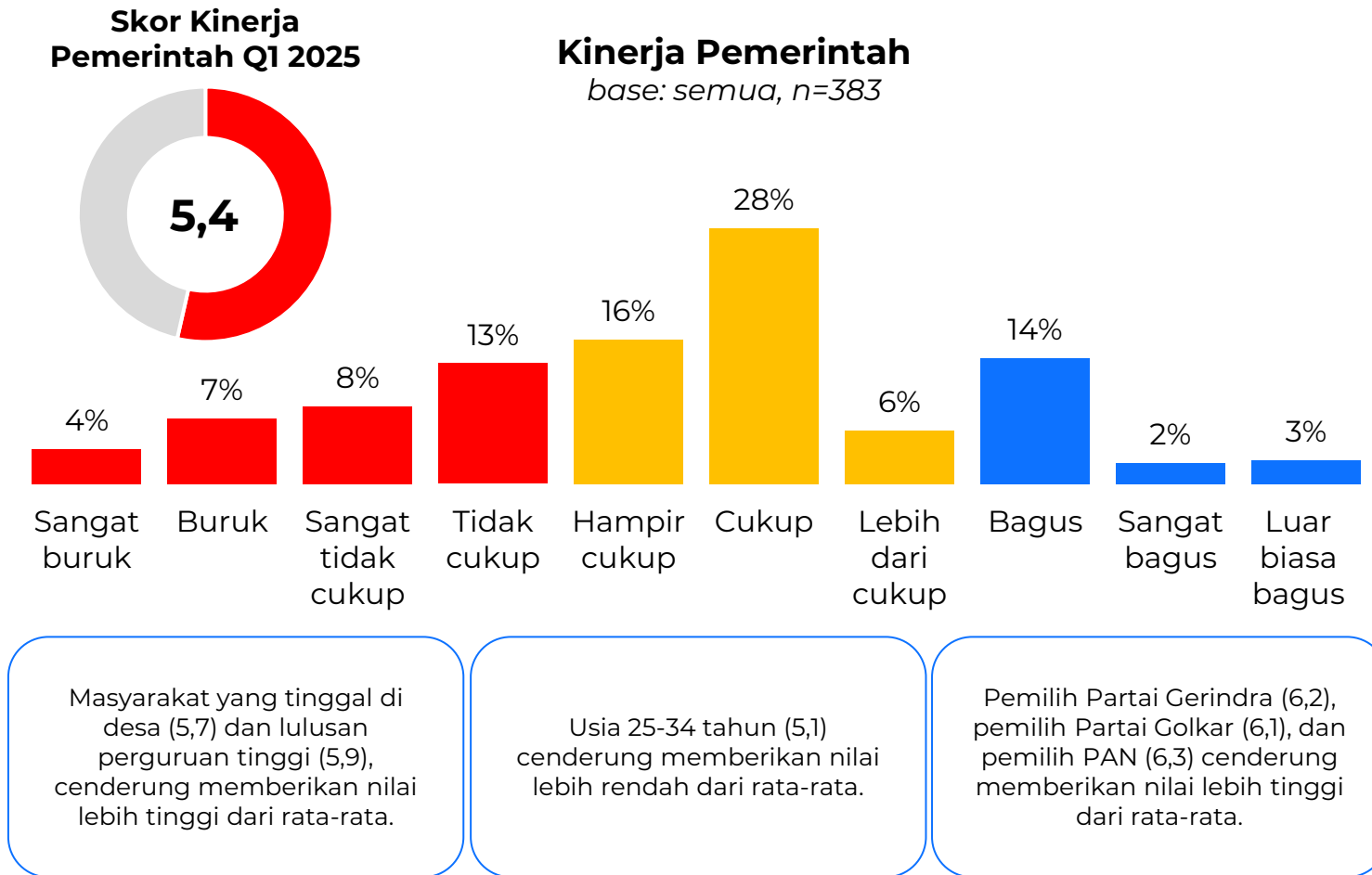
Mahalnya harga bahan pokok (56%) menjadi perhatian utama masyarakat untuk segera diselesaikan pemerintah. Hal ini mungkin disebabkan oleh semakin dekatnya bulan Ramadhan yang kerap berkaitan dengan kelangkaan bahan pokok.

Selain harga bahan pokok, pengangguran tinggi (51%) juga mendapatkan perhatian masyarakat yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah.



② Penilaian Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama mendapatkan skor rata-rata 5,4



Pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan skor rata-rata 5,4 (hampir cukup) dari 10 di 100 hari kerja pertamanya.

Rendahnya penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dipicu oleh berbagai masalah di awal kepemimpinan, termasuk kelangkaan gas LPG dan tantangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

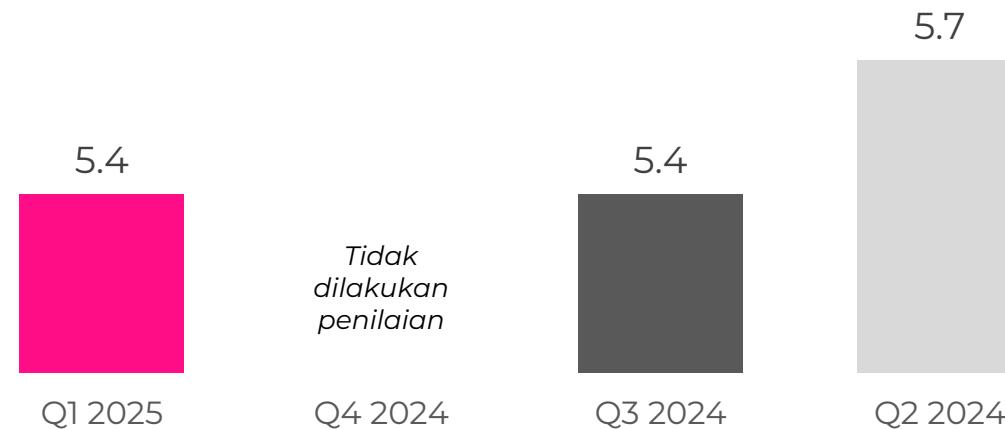
Rata-rata skor kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Penilaian Masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama tidak memperlihatkan perubahan signifikan dari rata-rata skor pemerintahan Jokowi di Q2 2024 (5,7) dan Q3 2024 (5,4).

Tidak adanya perubahan dalam persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mengindikasikan bahwa belum ada capaian signifikan dalam 100 hari pertama.

Tren Kinerja Pemerintah

base: variasi



Pemilih PKS dan PDIP cenderung lebih banyak menilai kinerja pemerintah buruk dan sangat tidak mencukupi

	Partai Politik								
	Total	PDIP	Partai Golkar	Partai Gerindra	PKS	PAN	Partai Demokrat	Partai lainnya	Golput
Sangat buruk	4%	2%	0%	4%	7%	1%	3%	6%	4%
Buruk	7%	2%	4%	4%	17%	3%	8%	13%	4%
Sangat tidak mencukupi	8%	19%	0%	1%	2%	1%	6%	16%	6%
Tidak cukup	13%	21%	11%	9%	16%	6%	14%	13%	12%
Hampir cukup	16%	5%	19%	12%	14%	24%	14%	19%	17%
Cukup	28%	29%	34%	30%	38%	22%	26%	19%	31%
Lebih dari cukup	6%	9%	7%	10%	0%	9%	3%	3%	6%
Bagus	14%	9%	17%	23%	0%	24%	23%	10%	14%
Sangat bagus	2%	0%	0%	6%	2%	9%	3%	0%	4%
Luar biasa bagus	3%	6%	7%	3%	2%	1%	0%	0%	1%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	383	40	33	124	32	52	25	31	46
Skor Rata-rata	5,4	5,3	6,1	6,2	4,6	6,3	5,5	4,5	5,6

Nilai tertinggi

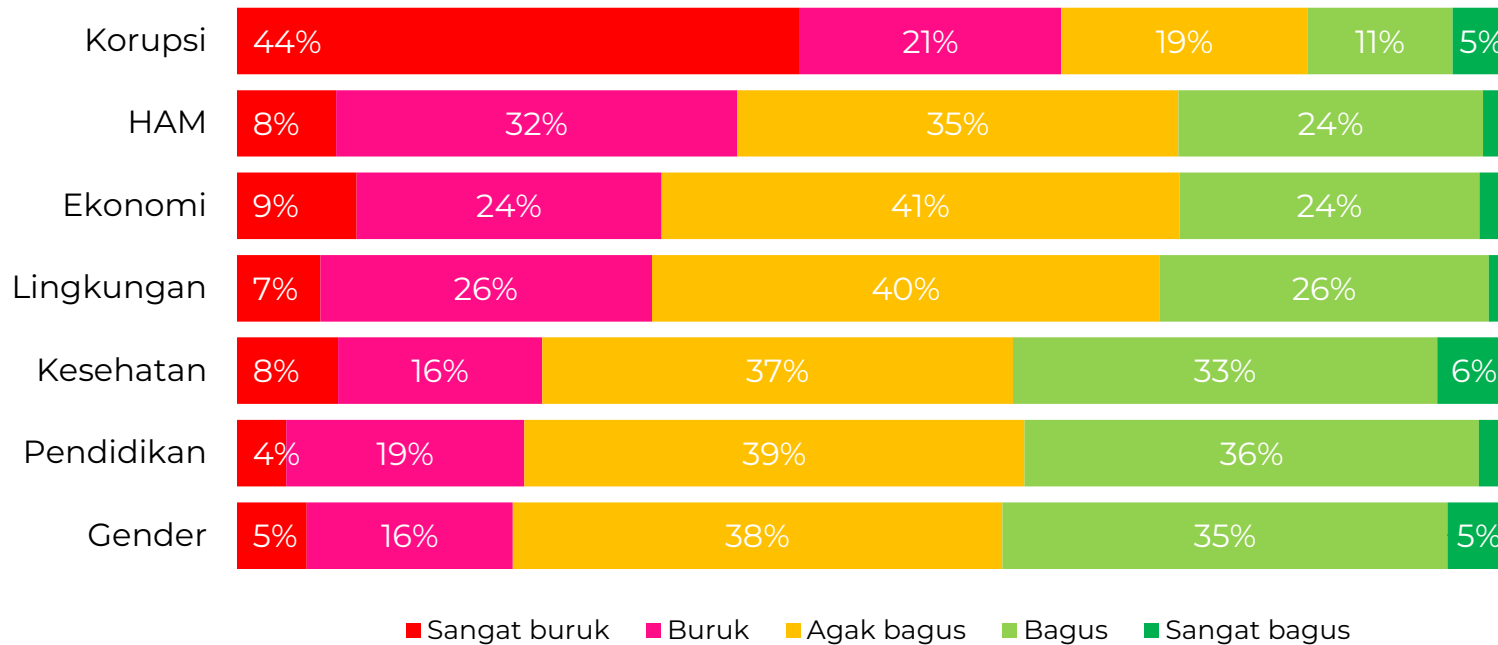
Signifikan lebih tinggi

Signifikan lebih rendah

Masyarakat memberikan penilaian buruk terhadap kinerja pemerintah pada korupsi, HAM, ekonomi, dan lingkungan

Kinerja Pemerintah

base: semua, n=383



Kinerja isu korupsi dinilai (sangat) buruk (65%), terutama oleh pemilih PDIP (78%).

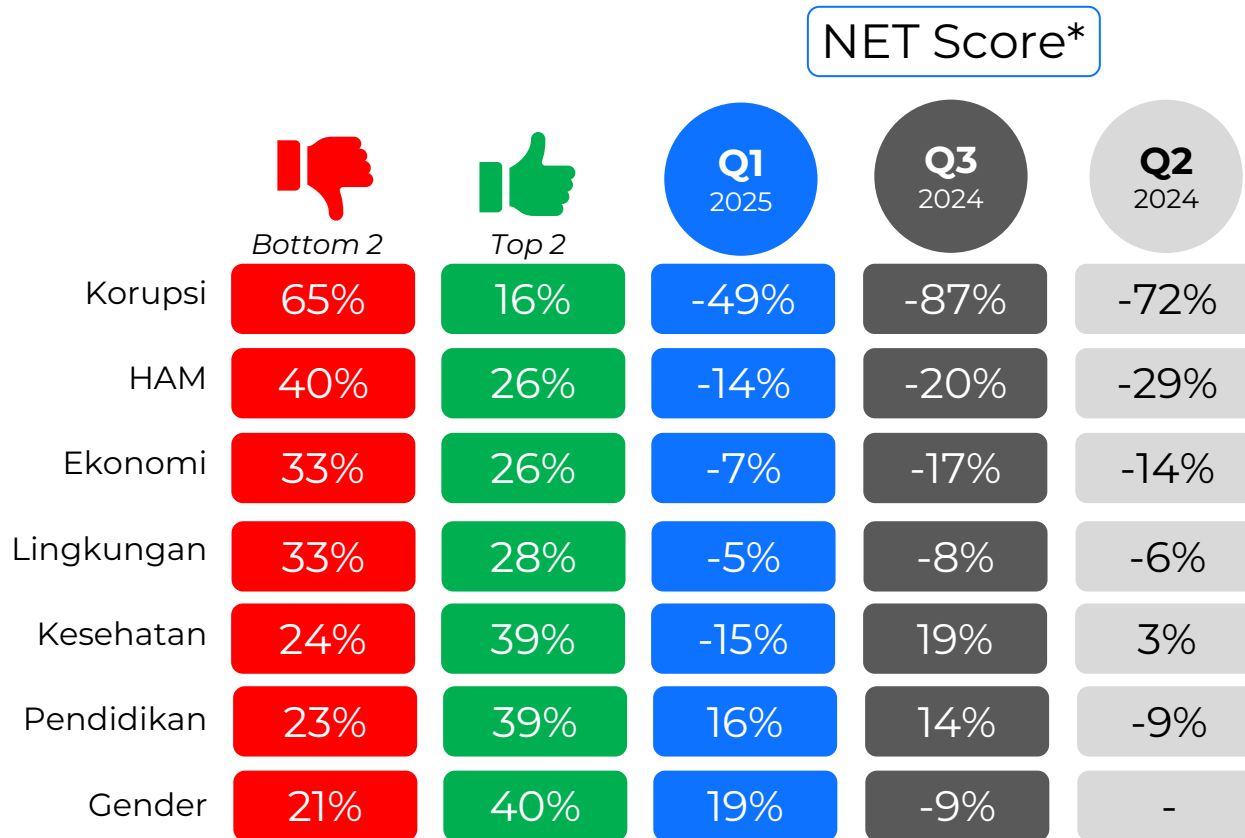
Kinerja isu HAM dinilai agak bagus (35%), terutama oleh masyarakat desa (48%) daripada masyarakat kota (35%).

Kinerja isu lingkungan dinilai (sangat) buruk (33%), terutama oleh laki-laki (38%) dan pemilih PDIP (50%).

Kinerja isu gender dinilai (sangat) buruk lebih banyak oleh masyarakat kota (28%), sedangkan masyarakat desa lebih banyak menilai agak bagus (48%).

Korupsi masih menjadi topik dengan penilaian paling buruk bagi pemerintah. Di sisi lain, topik HAM, ekonomi, dan lingkungan juga mendapatkan banyak penilaian buruk dari masyarakat. Isu-isu tersebut menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik.

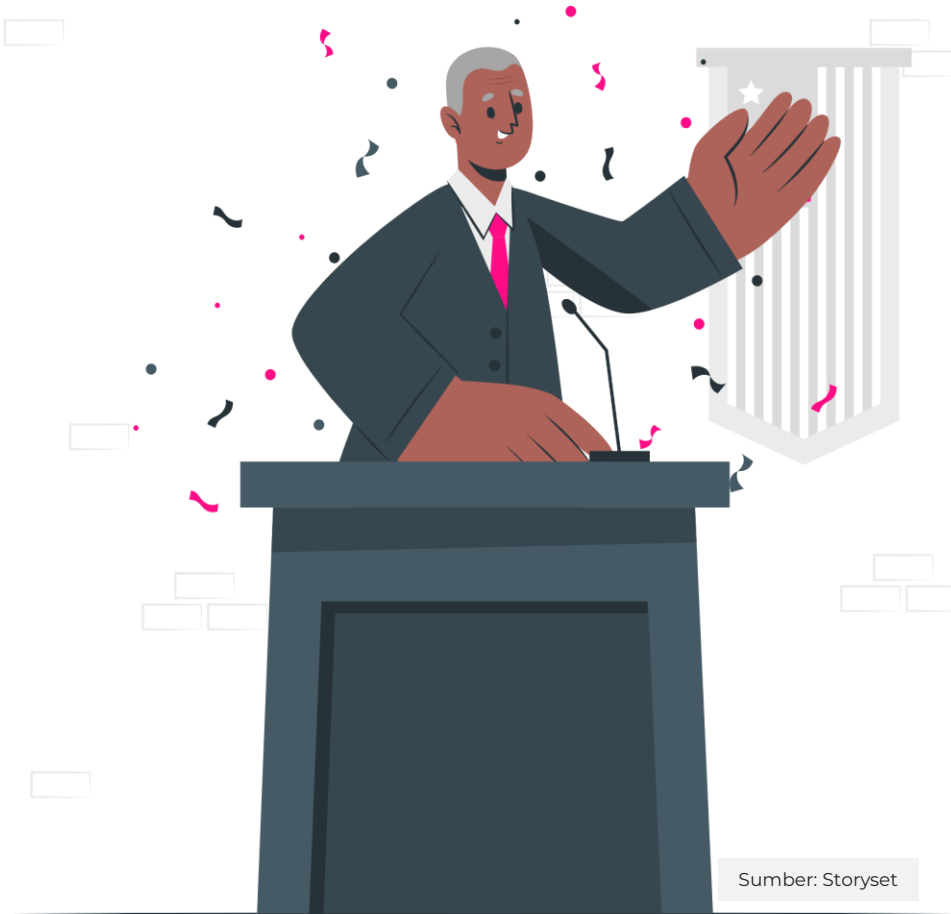
Meski membaik secara *NET score*, korupsi tetap menjadi topik krusial yang perlu segera ditangani pemerintah



Penilaian terhadap korupsi masih menjadi penilaian paling buruk bagi pemerintah. Meskipun terdapat peningkatan secara *NET score*, kondisi saat ini belum bisa dikatakan membaik.

Di sisi lain, topik HAM, ekonomi, dan lingkungan juga memperoleh *NET score* negatif, yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada sektor-sektor tersebut.

**NET score digunakan untuk memberikan gambaran sederhana tentang seberapa puas/penting sebuah topik. Skor ini diperoleh dengan jumlah respons positif (misalnya sangat puas) dikurangi respons negatif (misalnya sangat tidak puas).*



3 Ekspektasi terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Masyarakat yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu memenuhi program-program yang dijanjikan

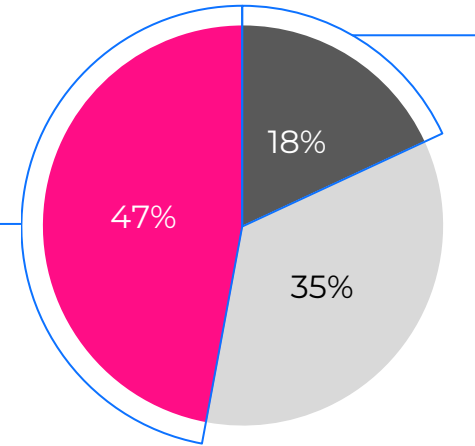
1 dari 2 masyarakat merasa yakin pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memenuhi program-program yang dijanjikan. Hal ini menunjukkan optimisme yang cukup besar dari masyarakat terhadap pemerintah Prabowo-Gibran.

Meskipun memperoleh keyakinan yang cukup besar, pencapaian ini lebih kecil ketimbang Q3 2024 (*NET score*: 33%). Penurunan keyakinan ini mungkin dipengaruhi oleh pelaksanaan beberapa program pemerintah yang menghadapi berbagai hambatan sehingga membuat sebagian masyarakat menjadi ragu.

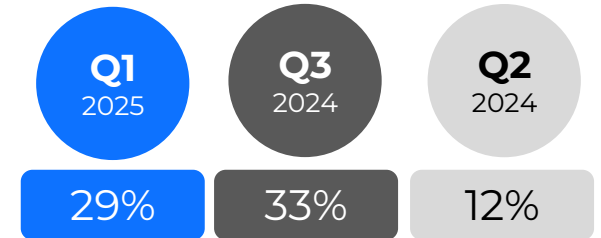
Keyakinan dalam Menjalani Program

base: semua, n=383

■ (Sangat) tidak yakin ■ Agak yakin ■ (Sangat) yakin



NET Score



Masyarakat yakin dengan janji pemerintah (47%), terutama oleh masyarakat desa (55%) dan pemilih KIM+ (Partai Golkar (60%), Partai Gerindra (69%), dan PAN (67%)).

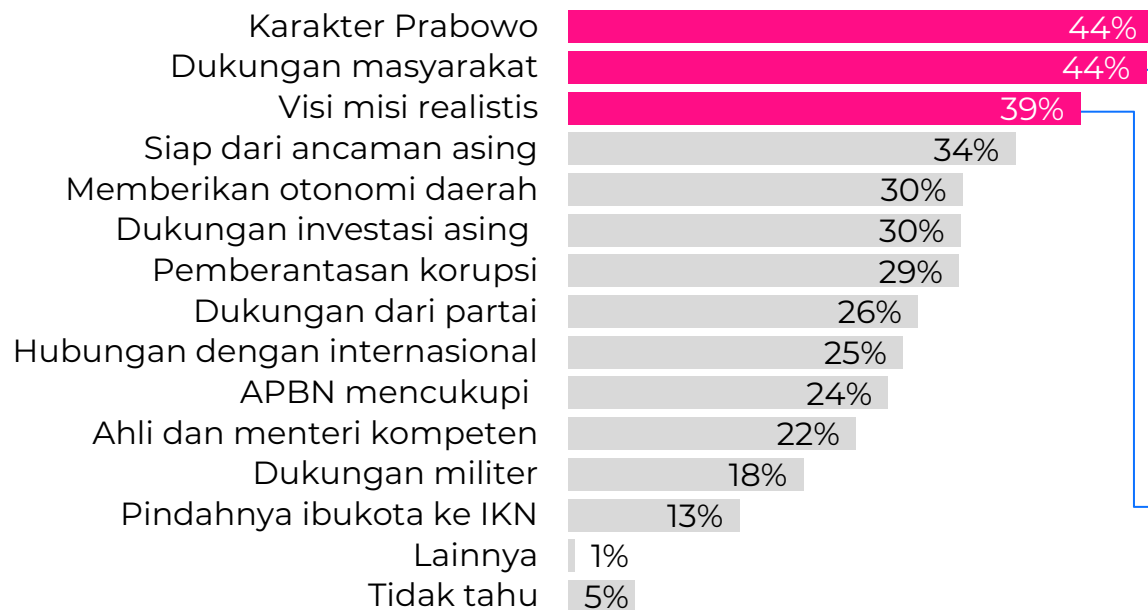
1 dari 5 masyarakat tidak yakin dengan janji pemerintah (18%) terutama oleh masyarakat kota (23%) dan pemilih PDIP (28%).

Karakter Prabowo dan dukungan masyarakat menjadi alasan utama masyarakat yakin pemerintah mampu memenuhi janji



Alasan Yakin Pemerintah Memenuhi Janji

base: yakin terhadap janji pemerintah, n=180



Karakter Prabowo menjadi alasan masyarakat yakin terhadap pemerintah (44%), terutama pemilih Partai Gerindra (60%).

Dukungan masyarakat menjadi alasan masyarakat yakin dengan pemerintah (44%), terutama masyarakat desa (53%).

Visi misi realistis menjadi alasan masyarakat yakin dengan pemerintah (39%), terutama lulusan perguruan tinggi (66%).

Masyarakat yang percaya dengan kemampuan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan programnya dengan baik melihat faktor karakter Prabowo (44%), dukungan masyarakat (44%), dan visi misi realistis (39%) sebagai alasan utama.

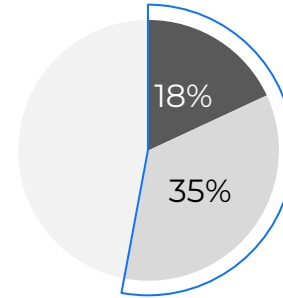
Temuan ini mirip dengan NKS Q3 2024 yang menempatkan karakter Prabowo (46%), dukungan masyarakat (37%), dan pemberantasan korupsi (35%) sebagai tiga alasan utama kesuksesan pemerintah.

Korupsi dan jumlah kementerian besar menjadi alasan utama masyarakat tidak yakin pemerintah mampu menjalankan programnya

1 dari 2 masyarakat yang tidak yakin dengan kemampuan pemerintah dalam menjalankan programnya melihat faktor korupsi (45%) dan besarnya jumlah kementerian (43%) sebagai alasan utama.

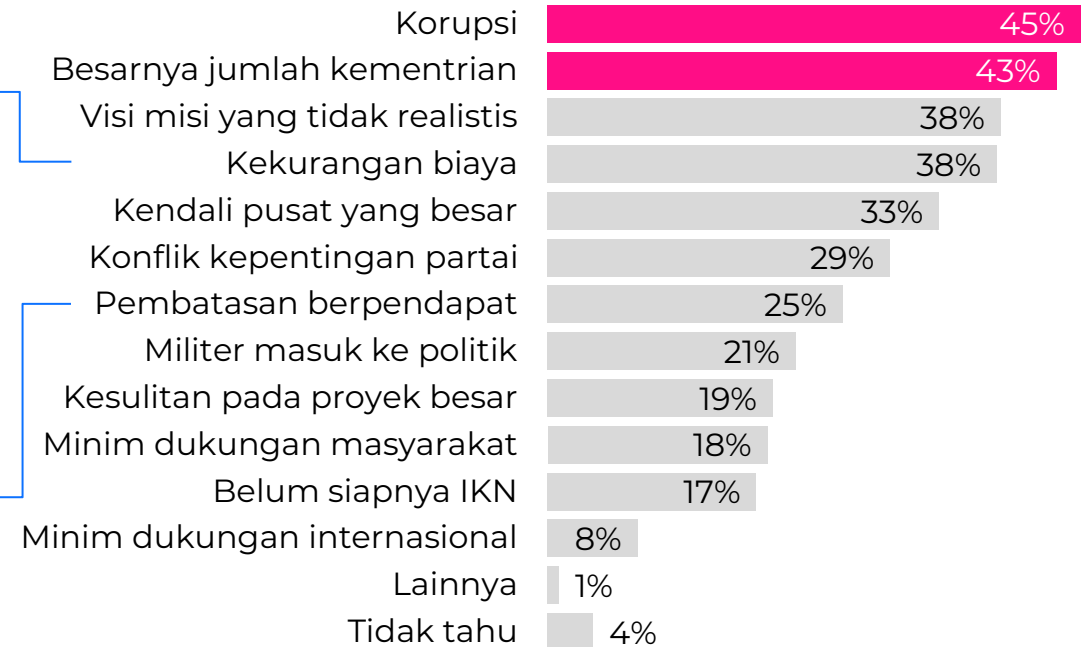
Hal ini berbeda dengan Q3 2024 yang menempatkan faktor korupsi (49%) dan konflik kepentingan partai (31%) sebagai dua alasan utama pemerintah tidak dapat menjalankan programnya dengan baik.

■ (Sangat) tidak yakin
■ Agak yakin



Alasan Tidak Yakin Pemerintah Memenuhi Janji

base: tidak yakin terhadap janji pemerintah, n=203



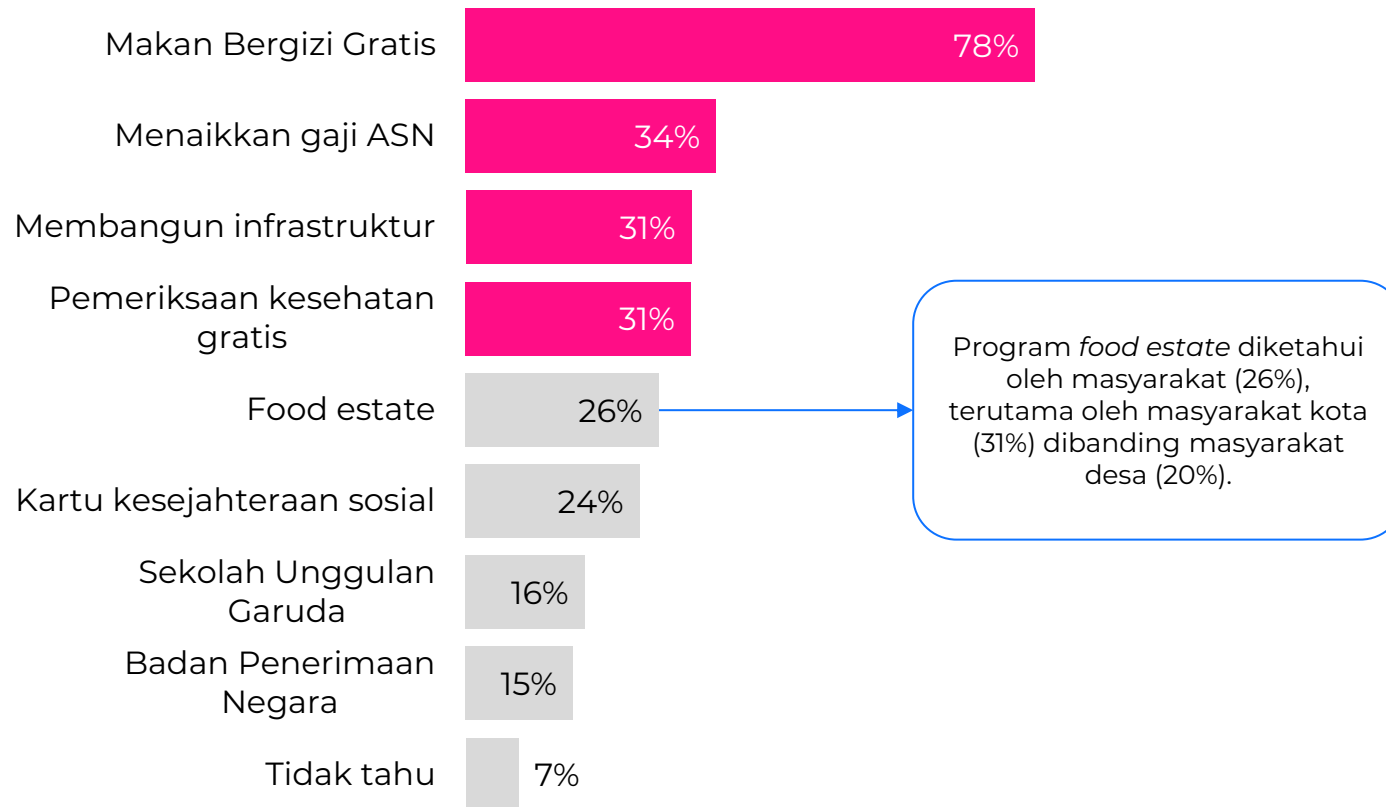
Kekurangan biaya menjadi alasan masyarakat tidak yakin dengan program pemerintah (38%), terutama usia 17-24 tahun (51%), lulusan perguruan tinggi (60%), dan pemilih PDIP (56%).

Pembatasan berpendapat menjadi alasan masyarakat tidak yakin dengan program pemerintah (25%), terutama masyarakat di Jawa (33%).

Makan Bergizi Gratis masih menjadi program yang paling dikenal oleh masyarakat

Pengetahuan Program Pemerintah

base: semua, n=383



Makan Bergizi Gratis (78%) masih menjadi program pemerintah Prabowo-Gibran yang paling dikenal. Temuan ini konsisten sejak Q2 2024 (71%) dan Q3 2024 (79%).

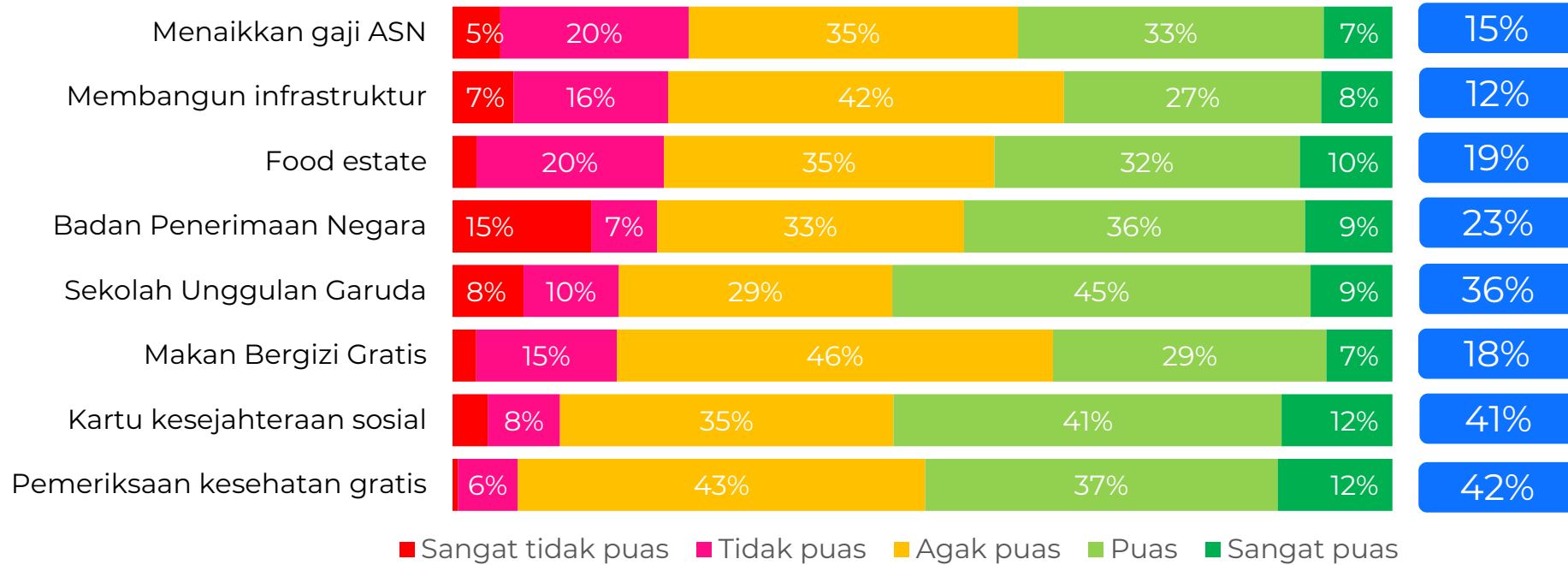
Perubahan signifikan terjadi pada program membangun infrastruktur desa, bantuan tunai, dan rumah murah bersanitasi untuk yang membutuhkan (31%) yang sebelumnya hanya dikenal oleh 22% masyarakat pada Q2 dan Q3 2024.

Sekolah Unggulan Garuda dan Kartu Kesejahteraan Sosial menjadi dua program dengan tingkat kepuasan terbesar

Kepuasan Terhadap Program Pemerintah

base: semua, n=variasi

NET Score



Kinerja program kenaikan gaji ASN dinilai (sangat) tidak memuaskan, terutama oleh usia 25-34 tahun (42%) daripada usia 17-24 tahun (14%).

Kinerja program *food estate* dinilai (sangat) memuaskan, terutama oleh usia 25-34 tahun (58%) daripada usia 17-24 tahun (21%).

Kinerja program Makan Bergizi Gratis dinilai (sangat) tidak memuaskan, terutama oleh masyarakat kota (23%) dibandingkan desa (10%), sama halnya dengan pemilih PDIP (26%) dibandingkan partai lainnya.

Program membangun infrastruktur desa, bantuan tunai, dan rumah murah bersanitasi untuk yang membutuhkan (12%), menaikkan gaji ASN (15%) dan Makan Bergizi Gratis (18%) menjadi tiga program dengan *NET score* terendah. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh pemberitaan tentang permasalahan pelaksanaan program, terutama pada program Makan Bergizi Gratis.



4 Pantauan Partai Politik

Partai yang baru bergabung dengan KIM+ setelah Pemilu mengalami tren penurunan perolehan suara

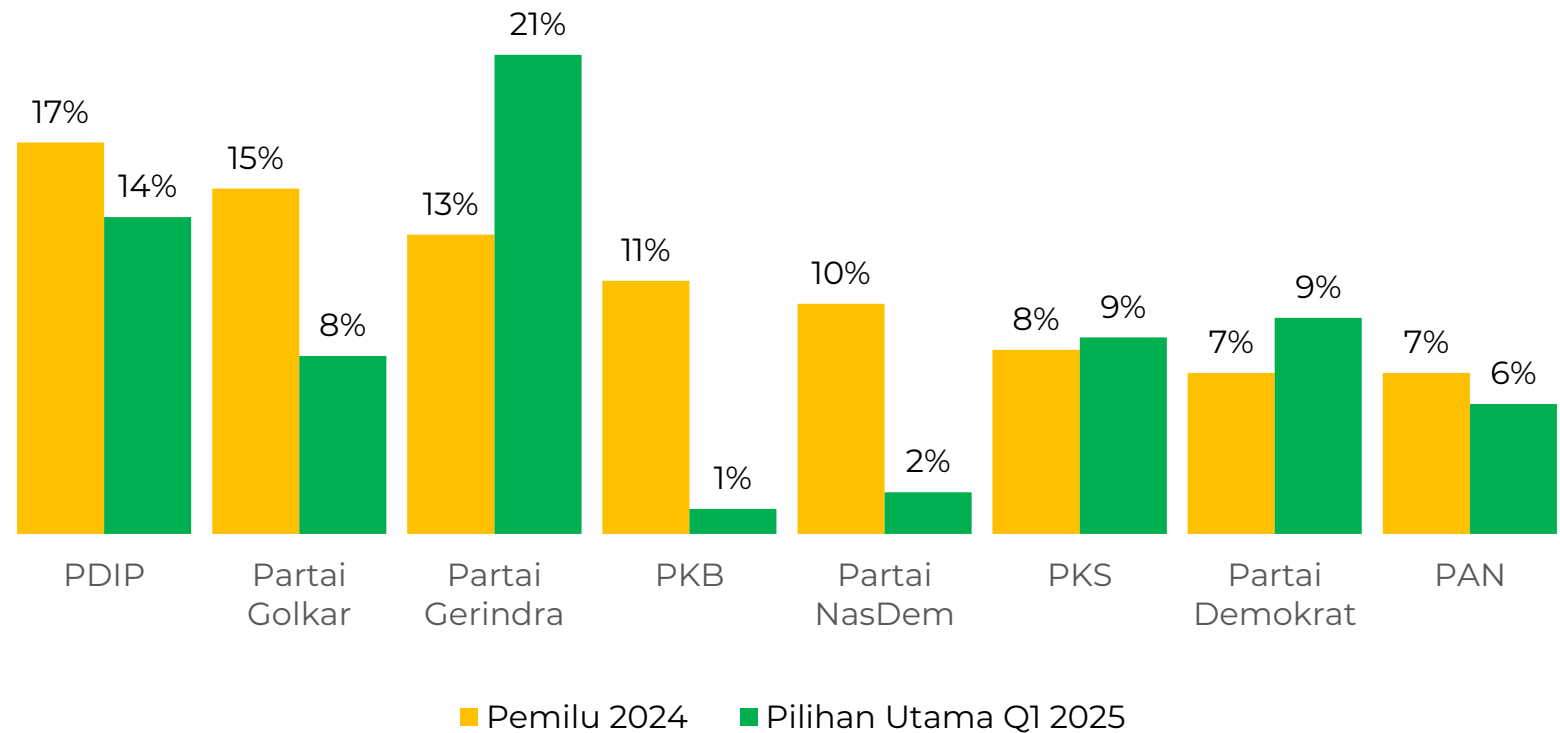
Partai yang baru bergabung dengan KIM+* setelah Pemilu (Partai NasDem dan PKB) mengalami tren penurunan perolehan suara.

Penurunan perolehan suara juga dialami oleh Partai Golkar (-7%). Namun, Partai Gerindra justru mengalami kenaikan perolehan suara (+8%). Kenaikan suara Partai Gerindra dapat disebabkan oleh efek popularitas Presiden Prabowo Subianto.

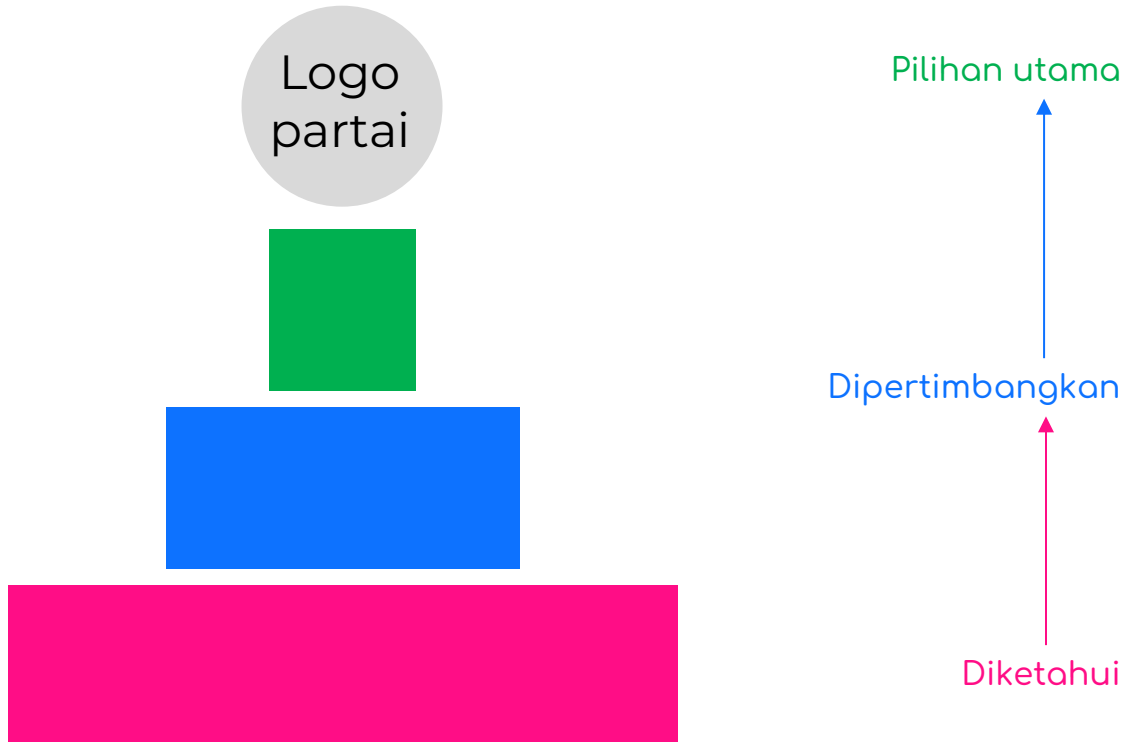
**Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+) adalah koalisi pendukung pemerintah Prabowo-Gibran yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PBB, PSI, PAN, Garuda, Prima, PKS, PKB, PPP, Perindo, dan NasDem.*

Perbandingan Preferensi Partai Saat Ini dan Hasil Pemilu 2024

base: semua, n=variasi



Cara membaca *funnel* partai politik



Jumlah responden yang benar-benar memilih partai ini sebagai pilihan utama mereka. Responden yang bisa menjadikan partai tersebut sebagai pilihan utama hanya responden yang mempertimbangkan partai tersebut.

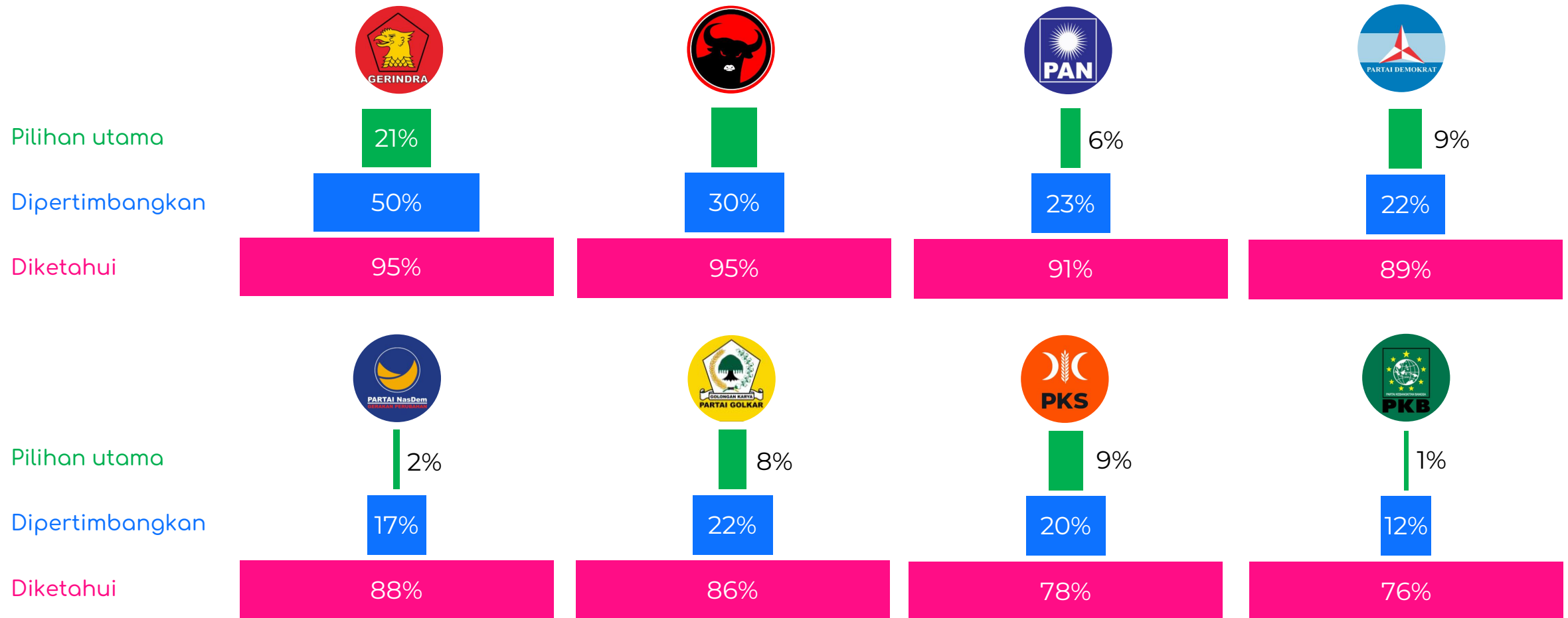
Jumlah responden yang mempertimbangkan untuk memilih partai tersebut. Responden yang bisa mempertimbangkan partai tersebut hanya responden yang mengetahui partai tersebut.

Jumlah responden yang mengenal partai ini, meskipun hanya sekadar tahu namanya. Semakin tinggi nilai persentase maka semakin dikenal partai tersebut.

Jika Pemilu diadakan hari ini, Gerindra dan PDIP paling banyak menjadi pilihan masyarakat Indonesia

Pantauan Partai Politik

base: semua, n=variasi



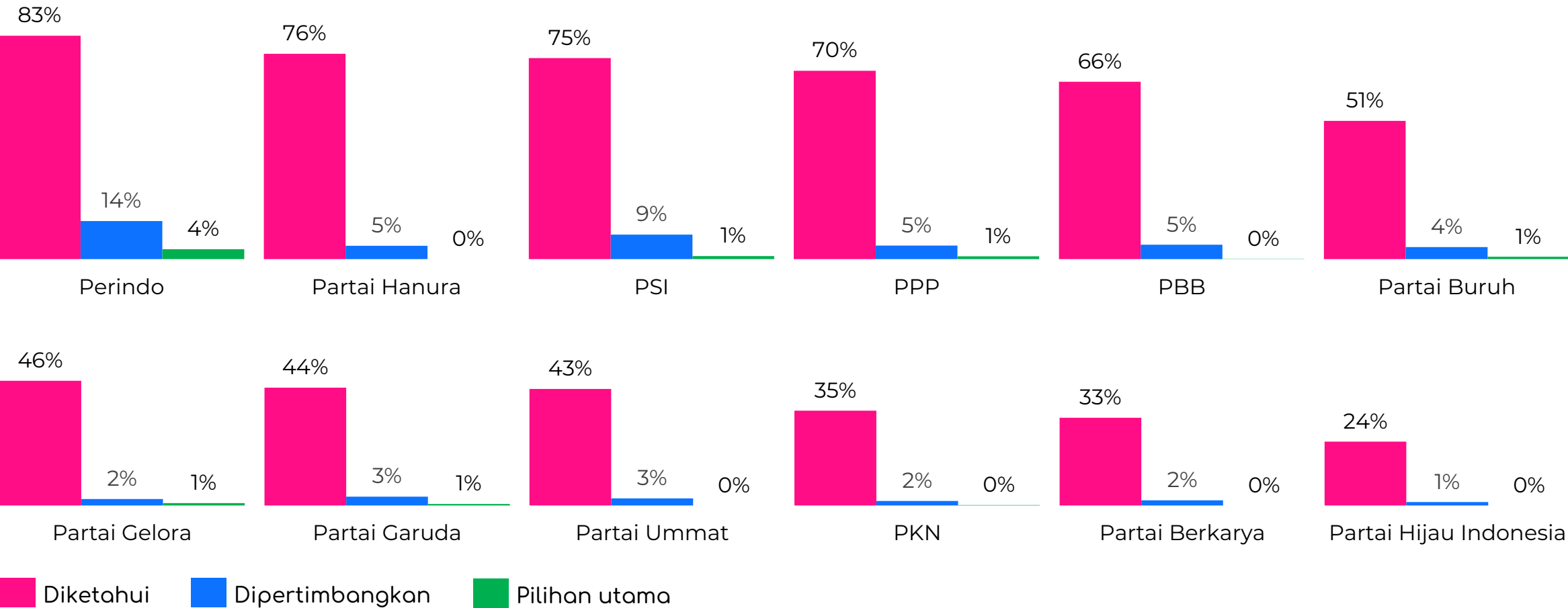
Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?

Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?

Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

Pada Q1 2025, Perindo menjadi satu-satunya partai non-parlemen yang berpeluang melewati *parliamentary threshold* (PT) 4%

Pantauan Partai Politik Non-Parlemen
base: semua, n=variasi



Q2 Manakah dari partai politik yang terdaftar dalam pemilu 2024 di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?
Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?
Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?



5 Opini Publik dalam RUU Berjalan

Cara membaca Indeks Partai Politik

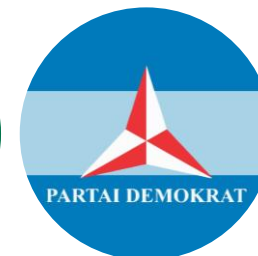
Indeks Partai Politik

Logo
partai

Nilai indeks

Indeks Partai Politik adalah sistem penilaian yang mengukur sejauh mana sikap partai politik selaras dengan preferensi masyarakat terhadap suatu isu. Skor diberikan berdasarkan tingkat kesesuaian posisi partai dengan opini publik, di mana partai yang lebih selaras dengan mayoritas masyarakat mendapat skor lebih tinggi, sementara yang berseberangan mendapat skor lebih rendah.

Indeks Partai Politik pada NKS Q1 2025 ditentukan berdasarkan sikap partai politik dan opini masyarakat terhadap RUU Penyiaran, RUU Polri, RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.



PKS, PKB, dan NasDem menjadi partai dengan sikap paing relevan dengan opini publik

Indeks Partai Politik

base: semua, n=383



61,1



61,0



61,0



46,2



35,6



35,5



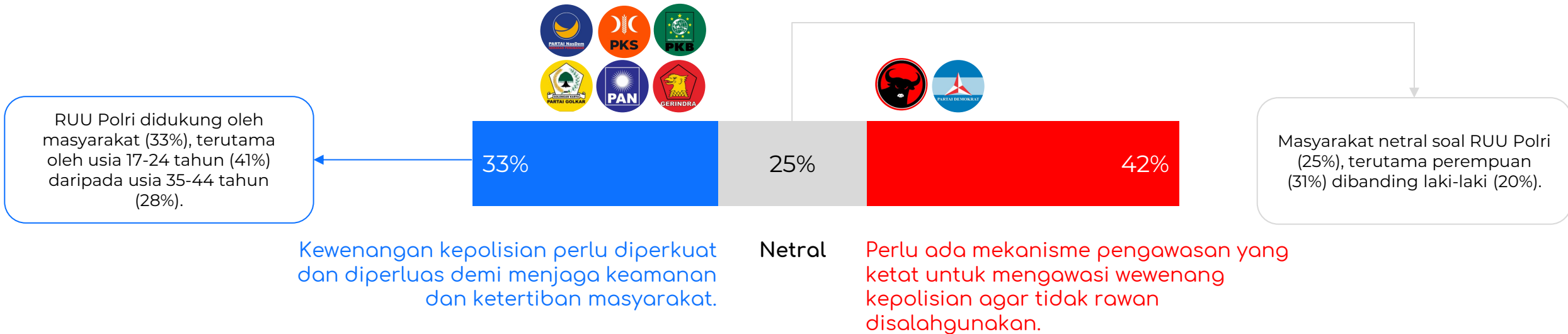
31,1



28,9

PKS (61,1), PKB (61,0), dan Partai NasDem (61,0) menjadi tiga partai dengan nilai indeks tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pada Q1 2025, ketiga partai tersebut adalah partai politik yang paling relevan dengan opini publik. Sebaliknya, sikap Partai Golkar (31,1) dan PDIP (28,9) terhadap isu-isu terpilih kurang sesuai dengan pandangan sebagian besar publik saat ini.

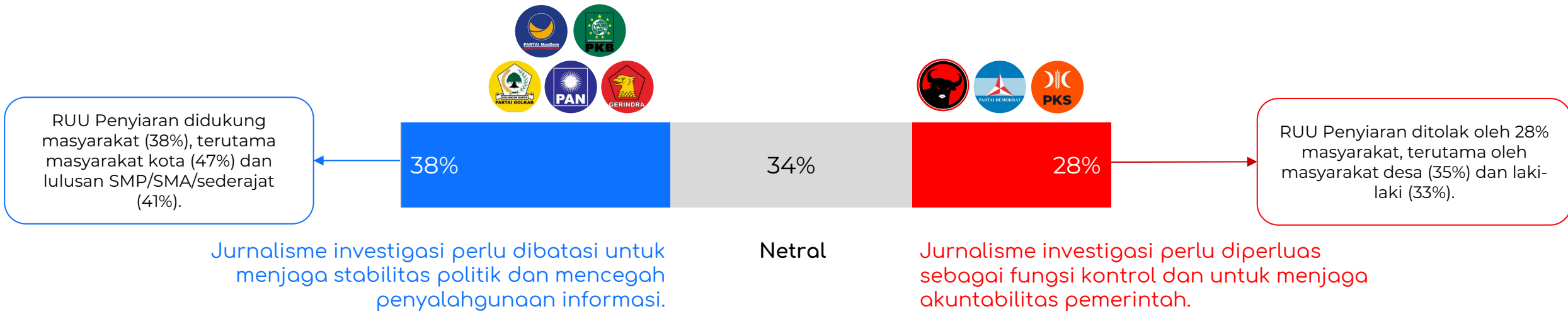
Sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan revisi UU Polri yang memperluas kewenangan kepolisian



RUU Polri adalah revisi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beberapa poin penting dalam draf revisi ini adalah:

- Pengawasan dan Blokir Ruang Siber:** Polri diberikan kewenangan untuk mengawasi, membina, dan mengamankan ruang siber, serta memblokir atau memutus akses ruang siber untuk mencegah kejahatan.
- Penyadapan dan Intelijen:** Polri dapat melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian dan melaksanakan kegiatan intelijen keamanan, termasuk penyelidikan dan penggalangan intelijen.
- Usia Pensiun:** Usia pensiun diperpanjang untuk Bintara dan Tamtama (58-60 tahun) dan Perwira (60-62 tahun).

Sikap masyarakat terhadap RUU Penyiaran



Revisi UU Penyiaran adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Beberapa poin penting dalam draf revisi ini adalah:

- Penggabungan Lembaga Penyiaran Publik:** RRI dan TVRI akan digabung menjadi Radio Televisi Republik Indonesia.
- Penyelesaian Sengketa Jurnalistik:** KPI diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran, yang sebelumnya merupakan wewenang Dewan Pers.
- Larangan Jurnalisme Investigasi:** Media dilarang menayangkan siaran eksklusif hasil jurnalistik investigasi.

RUU ini menuai kontroversi karena beberapa pasalnya dianggap mengancam kebebasan pers dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

3 dari 5 masyarakat setuju agar RUU Perampasan Aset disahkan

RUU Perampasan Aset didukung oleh masyarakat (65%), terutama oleh pemilih Partai Gerindra (77%).



65%

Disahkannya RUU Perampasan Aset akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya.



24%

Netral

11%

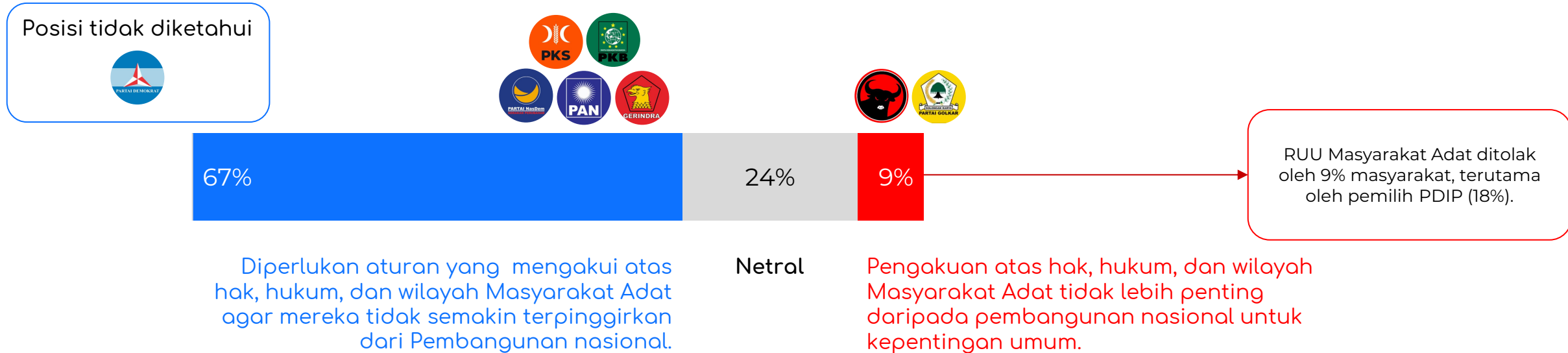
RUU Perampasan Aset ditolak oleh 11% masyarakat, terutama oleh pemilih PAN (22%).

RUU Perampasan Aset berisiko melanggar hak kepemilikan individu dan menjadi alat untuk menekan lawan politik.

RUU Perampasan Aset adalah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dalam menangani aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Beberapa poin penting dalam RUU ini adalah:

- 1. Pengembalian Aset Tanpa Putusan Pengadilan:** RUU ini memungkinkan pengembalian aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana.
- 2. Koordinasi Antar Lembaga:** RUU ini dirancang untuk memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, PPATK, dan kepolisian.
- 3. Rekomendasi FATF:** RUU ini disesuaikan dengan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang.

7 dari 10 masyarakat mendukung aturan yang mengakui dan melindungi hak Masyarakat Adat

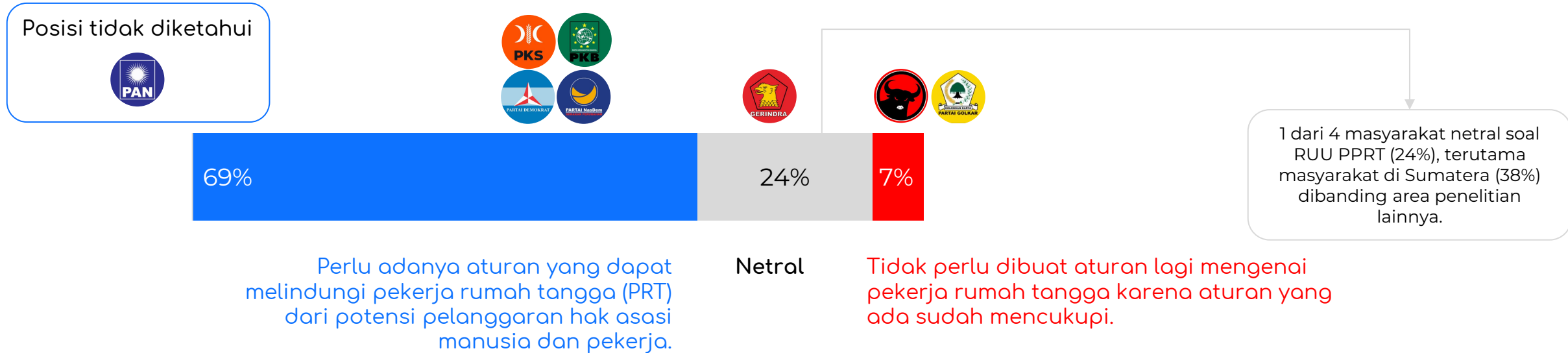


RUU Masyarakat Adat adalah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Beberapa poin penting dalam RUU ini adalah:

- Pengakuan dan Perlindungan:** RUU ini mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka, serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut.
- Kesetaraan Hak Perempuan:** RUU ini mencantumkan kesetaraan hak perempuan adat, yang memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

RUU ini masih dalam tahap pembahasan dan diharapkan dapat segera disahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat adat di Indonesia.

Mayoritas masyarakat mendukung rancangan UU PPRT untuk segera disahkan



RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) adalah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia. Beberapa poin penting dalam RUU ini adalah:

- Pengakuan dan Perlindungan:** RUU ini mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, upah yang adil, dan kondisi kerja yang layak.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum:** RUU ini mengatur tentang pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan hak-hak pekerja rumah tangga terlindungi.

RUU ini telah lama diperjuangkan dan masih dalam tahap pembahasan. Banyak pihak mendesak agar RUU ini segera disahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.